

## Nilai Manfaat Ekonomi Konservasi Borobudur

### *The Economic Benefits of Borobudur Conservation Area*

Amiluhur Soeroso\*

STIE Pariwisata API Yogyakarta

Y. Sri Susilo

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Abstract.** The purpose of this study is to select the management zone to avoid the deterioration of environmental goods, by conducting comparative value of the economic benefits of conservation between management focused on the monument that pay attention only to the entire ecosystem of Borobudur Regions. Two hundred tourists who came to Borobudur or Jogjakarta were obtained as samples. Data were collected using interviews with structured questionnaire. Afterward, we used contingent valuation method (CVM) to calculate the value of the economic benefits and we measured the total value of the individual consumer's willingness to conserve the heritage under several scenarios of hypothetical market. The results testify that the value of the economic benefits of Borobudur area conservation reached US\$4.2 billion per annum or around IDR40.1 trillion. This value reflects that the area of Borobudur is important to be preserved. Such values can be operationally useful when planning and management have been conducted comprehensively. The implication of this is that government should form a new governing body that is integrated in one management, holistic, involving multi-stakeholders both central and local governments and local communities. Organizations like these need to be run with the principle of shared responsibility and independence in financial. Therefore, as a World Heritage icon, the vision of the management of Borobudur area was needed to experience metamorphosis, from initially focus on short-term profits through increased tourism market, shifted to the achievement of long-term prosperity based conservation and education.

*Key words:* Borobudur conservation area, contingent valuation method, ecotourism

*JEL classifications:* C52, C01

#### PENDAHULUAN

Candi Borobudur menunjukkan saling ketergantungan nilai antara pariwisata dan sumber daya pusaka (*heritage*). Pusaka menciptakan landasan bagi pertumbuhan pariwisata, sebaliknya pariwisata menciptakan dana pelestariannya. Jadi pusaka akan kehilangan nilai tanpa partisipasi pengguna yang memanfaatkannya. Padahal pusaka Borobudur sebenarnya bukan hanya candi semata, namun meliputi pula keindahan lingkungan bentangalam dan budaya. Saujana budaya (*cultural landscape*)—gabungan kekayaan alam dan budaya Borobudur—sebagai barang publik memberikan manfaat ekologi dan ekonomi. Ekosistemnya selain memberikan pasokan air untuk irigasi persawahan dan air minum Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga menyediakan aktivitas geowisata, agrowisata, wisata perdesaan, wisata religi, jelajah wisata alam (*trekking*), bersepeda (*biking*), arung jeram (*white-water rafting*), pengamatan burung liar (*birdwatching*) khususnya *Spizaetus Bartelsi* (Elang Jawa, lambang Negara Republik Indonesia). Daerah ini memiliki sumber daya industri untuk kerajinan seperti gerabah, anyaman, makanan, sutera alam dan lain-lain. Jadi optimalisasi pengetahuan terhadap nilai sumber daya pusaka dapat

\*Alamat korespondensi: Jalan Babarsari No. 43 Yogyakarta, Indonesia, 55281. Email: yssusilo@gmail.com.

menjadi primadona peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Sayangnya, sejak selesainya restorasi dan dimasukkannya Candi Borobudur ke dalam daftar pusaka dunia pada tahun 1991, muncul isu negatif pada kawasan tersebut. Posisinya sebagai pusaka dunia dan tujuan wisata utama menyebabkan paradigma pengelolaannya berorientasi kuantitas (pariwisata masal), dengan tujuan pencapaian pendapatan jangka pendek. Paralel dengan itu, posisi pusaka dunia menyebabkan peningkatan kunjungan wisatawan rerata 2.127 juta orang per tahun (5.908 orang per hari), dengan tingkat pertumbuhan 2,48 persen (TWCBPRB (2006); WHC (2004)). Oleh karena itu Candi Borobudur menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari nafkah. Ini dapat dilihat dari jumlah pedagang yang berusaha di lingkungan candi sebanyak 3.156 orang, bahkan mencapai 7.500 orang pada masa puncak liburan. Mereka memaksa pengunjung membeli dagangannya (PJWB, 2005). Dari sisi kepariwisataan besarnya jumlah pengunjung sesungguhnya menggembirakan karena memberikan dana segar bagi keuangan pemerintah. Namun dari sisi fisik lingkungan sangat mencemaskan, karena pengunjung merupakan salah satu agen penting penyebab erosi tanah dan batu. Pariwisata masal juga dikhawatirkan mengancam lingkungan budaya lokal (Wall, 1995). Selain itu di kawasan Borobudur mulai banyak bermunculan hotel dan bangunan komersial lain, yang merubah karakteristik wilayah ini dari perdesaan ke arah perkotaan dimana membutuhkan energi besar dan mereduksi fungsi hidrologi. Hal ini dikhawatirkan mengganggu sistem ekologisnya.

Sesuai Keppres Nomor 1 Tahun 1992, pengelola Kawasan Borobudur terdiri dari tiga unsur, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggungjawab terhadap Monumen Candi Borobudur, Kementerian BUMN yang mengelola taman wisata di sekelilingnya, sedangkan Kementerian Dalam Negeri yang berwenang terhadap wilayah di luar itu. UNESCO (2003, 2006, dan 2009) melalui *reactive monitoring* yang berturut-turut menengarai adanya tekanan pembangunan fisik dan ekonomi terhadap Candi Borobudur, tidak ada koordinasi di antara pengelola dan juga di dalam pengelolaannya kurang melibatkan peran masyarakat sehingga berakibat terhambatnya upaya konservasi. Kemudian isu strategik lain yang muncul yaitu tidak adanya redistribusi pendapatan kepada masyarakat. Hal ini sangat ironis karena sebagai penyumbang PAD terbesar, Kecamatan Borobudur justru memiliki kemiskinan, pengangguran dan korban bencana sosial terbesar di Kabupaten Magelang.

Pembangunan fisik dan ekonomi yang berorientasi pencapaian keuntungan jangka pendek berujung pada terabaikannya nilai Borobudur sebagai pusaka dunia dan sekaligus menimbulkan konflik antara upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan itu sendiri, khususnya pembangunan ekonomi. Meskipun selama ini nilai tersebut tidak tercermin dalam mekanisme pasar, namun bukan berarti hilang atau pelayanan yang diberikan cuma-cuma. Jika nilai kawasan itu dapat dipertahankan, publik akan mendapat pengalaman kebudayaan yang integral sehingga menjamin kelangsungan lingkungan hidup bagi kepentingan generasi mendatang. Hal ini juga didasari fakta bahwa fokus manajemen pada kepentingan artefak, situs dan monumen semata, sekarang mulai ditinggalkan. Pengelolaan pusaka (*heritage*) UNESCO yang baru fokusnya lebih menekankan pada kawasan tempat manusia hidup untuk mengembangkan *living culture*-nya (Engelhardt, 2005).

Banyak studi di masa lalu yang telah mengupas Borobudur dari berbagai sudut, seperti bangunan candi (Atmadi, 1979), sosial-budaya masyarakat (Surachman, 1990), ekonomi pedagang (Zubadi, 1992), perkembangan permukiman (Setyawibawa, 1998), geologi (Budiadi, 1992), keberadaan danau purba (Murwanto *et al.*, 2004) dan perubahan tata ruang (Winarni, 2006). Kemudian sejak tahun 2007, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan kajian tentang penataan ruang dan ek-

splorasi pariwisata alternatif di Kawasan Borobudur. Namun kajian tersebut belum secara komprehensif mengeksplorasi pengelolaannya. Dengan demikian sangatlah menarik bila penelitian ini menyajikan nilai manfaat ekonomi kawasan Borobudur dalam upaya konservasi ekosistem sebagai pendukung kebijakan manajemen yang lebih baik di Kawasan Borobudur.

Pembangunan bukan hanya dipandang perlu untuk meningkatkan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan ekologi lingkungan. Tujuannya untuk memuaskan kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi di masa depan (Brown, 2001). Dalam mazhab eko-ekonomi, tidak dilakukan *trade-off* antara ekonomi dan ekologi lingkungan, tidak juga mendahulukan ekonomi atau lingkungan; tetapi justru mengkolaborasikan, mensinergikan dan mensinkronisasikan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan secara simultan dengan memasukkan perpaduan keduanya ke dalam pusat sirkulasi harmonisasi pembangunan.

Dalam konteks ini Candi Borobudur tidak ditempatkan sebagai titik utama kajian sehingga dipandang sebagai pusaka atau warisan budaya yang telah ditinggalkan dan dikelola sebagai sumber daya pasif (*death monument*) sebagaimana sering dilakukan selama ini, tetapi monumen tersebut hanya diletakkan sebagai bagian inti dari suatu kawasan luas dan menjadi salah satu sumber daya budaya hidup yang berperan penting dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan membentuk vitalitas sosial-budaya masyarakat.

Oleh karena itu agar terdapat sinergi dan sinkronisasi antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dan memberi arahan eliminasi konflik antara pengembangan pariwisata dan konservasi kawasan Borobudur yang meliputi Candi Borobudur dan daerah di sekitarnya perlu dilakukan sebuah kajian. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah memilih zona pengelolaan yang lebih baik untuk menghindari penurunan kondisi barang lingkungan, dengan melakukan komparasi nilai manfaat ekonomi konservasi antara pengelolaan yang terfokus kepada monumen saja dengan yang memperhatikan keseluruhan ekosistem Kawasan Borobudur.

#### TINJAUAN PUSTAKA

**Borobudur.** Kawasan Borobudur tempat keletakan candi perlambang bunga teratai tempat Budha Maitreya reinkarnasi adalah bangunan pusaka dunia (*world heritage*) yang pada masa paruh kedua zaman kuartar berdiri di atas danau. Nuansa ini hilang akibat letusan kuat Gunung api Merapi pada abad XIII (Murwanto *et al.*, 2004: 2). Secara ekologis candi yang terletak 42 km di sebelah barat laut Kota Yogyakarta itu berada di bentanglahan (*landscape*) agak tertutup dalam cekungan antargunung laksana panggung pertunjukan maha besar (Taylor, 2003: 51). Gabungan sumber daya alam dan vitalitas masyarakat membentuk saujana budaya (*cultural landscape*) yang penting bagi pembangunan sehingga harus dilestarikan untuk generasi berikutnya dalam keadaan baik, tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuk pusaka masa datang (JPPI *et al.*, 2003).

Penelitian terdahulu terhadap pusaka masyarakat di dunia seperti Borobudur kebanyakan fokus pada: (i) restorasi (Caporossi, 2004), pelestarian (Himayatullah (2003); Tempesta dan Thiene (2003)) dan pengelolaan (Jebessa (2004); Rashev (2003)); (ii) kesejahteraan (Grijalva. *et al.*, 2001) dan peningkatan kualitas lingkungan (Rodriguez, 2000). Sementara itu di Borobudur sendiri juga telah dilakukan penelitian di antaranya oleh Winarni (2006), Murwanto *et al.* (2004), Setyawibawa (1998), Zubadi (1998), Budiadi (1992), Surachman (1990), dan Atmadi (1979) dengan fokus kajian pada bidang sejarah, arkeologi, geografi, geologi, teknik dan pariwisata. Seluruh kajian tersebut belum pernah mengeksplorasi

pembangunan dengan melihat nilai manfaat ekonomi kawasan Borobudur sebagai barang publik, dengan demikian kajian ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

**Ekosistem.** Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Pasal 1 Butir 4 UUPH Nomor 23 Tahun 1997). Bentuk jasanya bernilai ekstrinsik dan intrinsik (preservasi pusaka, memelihara barang bagi kepentingan generasi mendatang), opsi (keanekaragaman), kebudayaan (estetika, artistik, pendidikan, spritual, keilmiahan) (Costanza (1997: 388); Moons (2003: 3)).

Di dalam suatu ekosistem terkandung berbagai unsur baik alam, kebudayaan manusia maupun gabungan keduanya. Ketiganya merupakan sumber daya penting, yang perlu dipreservasi dan dilestarikan, sehingga menjadi bagian kemitraan yang mutual benefit dengan industri pariwisata (Wight, 1993: 5). Oleh karena itu, agar lingkungan dapat dinikmati, digunakan dan tidak diubah peruntukannya ataupun dihancurkan diperlukan upaya: (i) preservasi yaitu pencegahan degradasi lingkungan dan menjaga kelestariannya agar tetap pada kondisi yang ada; dan (ii) konservasi yaitu perlindungan terhadap lingkungan yang dianggap mempunyai nilai penting baik historis, arsitektural, budaya dan lain-lain.

**Kepariwisata.** Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 1 diberikan pengertian bahwa: (i) wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara; (ii) pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; dan yang perlu diperhatikan adalah (iii) kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Lebih lanjut, Merric dan Hunt (1998: 37) dan juga Sirakaya dan McLellan (1998: 42-43) menyatakan bahwa pengembangan mutakhir pariwisata adalah pada ekowisata, yang terminologinya melakukan perjalanan wisata, sambil merespon pelestarian ekologi, sosial-ekonomi-budaya dan sejarah alam daerah. Pariwisata ramah lingkungan atau ekowisata bukan hanya fokus kepada perjalanan menikmati keindahan alam saja, namun sekarang justru diinterpretasikan lebih luas dengan memasukkan konservasi kebudayaan masyarakat lokal (Ayala, 1996: 46). Pengelolaan ekowisata dinilai sukses jika dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat, melindungi sumber daya lahan, dan juga melestarikan nilai kebudayaan dan sosial masyarakat, termasuk tempat bersejarah di suatu tempat.

Definisi ekowisata akhir-akhir ini dipertajam sehingga melahirkan konsep ekomuseum dan ekobudaya yang berhubungan erat dengan ekoeкономи. Ohara (1998: 1-3) menyampaikan bahwa ekomuseum merupakan aktivitas yang bertemakan ekologi dengan tujuan mengembangkan suatu daerah menjadi sebuah *living museum*. Konsepnya adalah keseimbangan dan terintegrasinya ketiga elemen yaitu pelestarian pusaka (*heritage*), partisipasi masyarakat dan aktivitas sebuah museum (Gambar 1). Sementara ekobudaya menurut Gossen (1993: 2-3) merupakan bentuk integrasi antara organisme dan lingkungannya dengan manusia, dengan tujuan memperbaiki kebiasaan dan perilaku buruk pengelolaan ekologi termasuk dampak terhadap lingkungan dan eksternalitasnya. Ekobudaya fokusnya

pada eksistensi pengetahuan tradisional dan mendukung penggunaan bahan baku lokal, sedangkan ekoekonomi merupakan perekonomian yang memperhatikan ekologi dengan tujuan memuaskan kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi di masa depan (Brown, 2001: 77-78). Perekonomian dapat berkelanjutan hanya jika memperhatikan prinsip-prinsip ekologi dan bila tidak justru akan menyebabkan penurunan dan secepatnya runtuh.

**Pusaka Saujana Budaya (*Cultural Landscape*).** Pusaka dunia (*world heritage site*) dapat merupakan bentukan alam atau kebudayaan hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia yang istimewa. Pusaka saujana (*Cultural Landscape*) yang memiliki konotasi sejauh mata memandang, adalah gabungan dari keduanya dalam kesatuan ruang dan waktu (JPPI, 2003). Pusaka budaya merupakan modal penghasil nilai ekonomi dan kebudayaan. Modal kebudayaan memasukkan unsur nilai yang dimiliki masyarakat seperti sosial, sejarah dan dimensi kebudayaan lainnya (Throsby (1999: 12), (2001: 23); Benhamou dalam EUR (2003: 255), Klamer dan Zuidhof dalam GCI (1998: 23-24)). Menurut Throsby (ANU, 2000: 12), konsep sumber daya kebudayaan memiliki beberapa persamaan dengan sumber daya alam dalam hal sifat pembangunannya yang *ecological economics*. The World Heritage Committee (WHC) dan Australia ICOMOS (1995) menyatakan bahwa saujana budaya (*cultural landscape*) terapkan pada suatu kawasan bentanglahan (*landscape*) yang memiliki pemandangan alam dengan arti khusus bagi manusia untuk dikembangkan. Terminologi saujana budaya merupakan manifestasi keanekaragaman interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya. Saujana budaya merepresentasikan sebuah kontinum pola penggunaan lahan yang melampaui beberapa generasi. bentanglahan ini merupakan ekspresi evolusi dari nilai-nilai kebudayaan manusia, norma-norma dan sikap terhadap lahan tersebut. Sikap ini terungkap melalui kualitas visual dari sisa sejarah pengaruh manusia pada bentanglahan modern. Jadi saujana budaya dibuat melalui hubungan yang intensif antara kebudayaan dan alam yang membentuk lingkungan dalam waktu yang lama dan menghasilkan bentanglahan di masa kini. Oleh karena itu kebudayaan dan bentanglahan berhubungan sangat kuat. Kebudayaan lahir dari bentanglahan seperti pembentukan keyakinan dan nilai manusia terhadap sumber daya yang mengelilingi dan merangkainya (Coleman, 2002).

Dalam kasus Borobudur, keindahan candi atau monumen yang merupakan mahakarya manusia berasosiasi dengan kawasan di sekitarnya. Candi Borobudur sebagai barang kebudayaan hanya dapat eksis karena dukungan fisik bentangalam tempat keletakannya. Hal ini tercermin pula dalam relief monumen tersebut yang memperlihatkan alam dan kehidupan rakyat di sekitarnya pada masa lalu.

**Sumber Daya dan Nilai Manfaat Ekonomi Barang Pusaka.** Sumber daya merupakan suatu produk yang memiliki nilai ekonomi sehingga diperlukan bukan untuk dirinya sendiri tetapi sebagai sarana mencapai tujuan. Sumber daya dapat menghasilkan utilitas (kepuasan) tanpa melalui proses produksi seperti keindahan panorama bentangalam, dapat bukan merupakan faktor produksi tetapi memberikan utilitas dalam bentuk pemandangan yang dapat dinikmati masyarakat. Nilai sumber daya tidak hanya menyangkut yang dikonsumsi tetapi juga menyangkut yang tidak dikonsumsi secara langsung. Dengan demikian pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang lebih luas karena memiliki nilai intrinsik yaitu nilai yang terkandung di dalamnya, terlepas dikonsumsi atau tidak. Bahkan pada sisi yang ekstrim, ada manusia atau tidak (Fauzi, 2005).

Sumber daya pusaka memiliki dua buah nilai yaitu ekstrinsik (*use value*) dan intrinsik (*non-use value*). Nilai ekstrinsik merupakan maksimum kesediaan membayar untuk memperoleh

akses terhadap obyek. Pada barang pusaka yang memiliki ciri barang publik, nilai ekstrinsik merupakan jumlah uang terbesar yang bersedia dibayar pengguna, melebihi ongkos riil untuk memakai kawasan tersebut. Nilai ekstrinsik total sebuah obyek merupakan jumlah total kesediaan membayar pengguna secara individu. Adapun untuk nilai intrinsik termasuk manfaat yang dinikmati manusia karena mereka mengetahui bahwa situs tersebut dilestarikan.

Barang pusaka (*heritage*) seperti Candi Borobudur memiliki dua ciri barang publik. Pertama, bersifat tidak eksklusif sehingga secara teknis tidak mungkin dikuasai pemanfaatannya oleh pemakai. Kedua, bersifat tidak bersaing dalam konsumsi artinya dua orang yang berbeda dapat menikmati atau mengkonsumsi barang publik pada waktu yang sama tanpa saling terganggu kenikmatannya (Navrud dan Ready, 2002).

Sementara pengertian nilai, khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya pusaka, dapat berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Perbedaan konsepsi nilai tersebut tentu menyulitkan pemahamannya. Oleh sebab itu diperlukan suatu kesamaan persepsi untuk menilainya. Salah satu tolok ukur yang relatif mudah dan dapat diterima pada berbagai disiplin ilmu adalah pemberian harga pada produk yang dihasilkannya atau dengan perkataan lain mencari nilai manfaat ekonominya. Dengan begitu nilai ekonomi adalah ukuran jumlah maksimum suatu produk yang ingin dikorbankan seseorang untuk memperoleh produk yang lain atau memperlihatkan kesediaan perseorangan membayar manfaat atau menghindari biaya yang muncul. Konsep ini secara formal disebut kesediaan individu untuk membayar (*willingness to pay/WTP*) produk yang dihasilkan oleh sumber daya pusaka. WTP dapat diartikan pula sebagai jumlah kesediaan membayar maksimal individu menghindari penurunan kondisi barang. Dengan pengukuran ini, nilai barang pusaka ditransformasikan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter produknya.

**Perilaku Antropogenik dan Pengelolaan Sebuah Kawasan.** Dalam pembangunan khususnya ekowisata, sikap dan perilaku konsumen merupakan unsur yang penting bagi kelangsungan eksistensinya. Sikap merupakan kecenderungan berperilaku tertentu terhadap obyek sedangkan perilaku menurut Lewin (Gibson *et al.*, 1997) adalah fungsi variabel individu dan lingkungan. Variabel individu berkaitan dengan aspek demografi. Hubungan perilaku dan sikap kepedulian terhadap lingkungan memperlihatkan bahwa keduanya adalah prediktor psikografi dari keputusan berpartisipasi atau tindakan berdasarkan kepedulian lingkungan. Beberapa literatur riset perilaku menunjukkan peranan sikap sebagai prediktor perilaku dan tujuan; dan sebagai faktor penjelas variasi perilaku individu (Luzar, 1998: 51).

Namun kebanyakan studi tentang sikap kepedulian terhadap lingkungan dilakukan di luar bidang ilmu sosial yaitu fisik, sedangkan analisis terhadap variabel sosial ekonomi dan psikografi yang berpengaruh terhadap sikap peduli lingkungan belum pernah dilakukan. Cara pandang atau paradigma baru (*new ecological paradigm*) terhadap pengelolaan lingkungan sekarang ini hakekatnya didorong oleh sikap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Tiga aspek paradigma ekologi yang baru berbicara tentang keyakinan konflik manusia dan alam, keterbatasan bertumbuh dan kepatutan peran manusia di alam (Dunlap dan Van Liere, 1978). Semakin tinggi kualitas atribut lingkungan ABC (*Abiotic, Biotic and Cultural*), maka probabilitas kunjungan konsumen ke daerah itu diyakini akan semakin meningkat pula di masa depan (Mercer *et al.*, 1995: 253).

UNESCO sendiri telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan pusaka dunia. Bila

dulu hanya berorientasi terhadap elemen lingkungan A (*Abiotic*) yaitu berupa monumen atau situs arkeologi saja, kini telah bergeser pada tempat dan ruang manusia yang hidup di sekitarnya. Artinya, jika dulu fokusnya hanya pada satu titik yaitu monumen, sekarang telah bergeser ke wilayah yang lebih luas yaitu kawasan. Konsekuensinya, unsur B (*Biotic*) dan C (*Cultural*) menjadi bagian tidak terpisahkan dengan anasir A (*Abiotic*), sehingga modus penggunaan monumen juga beralih, bukan hanya untuk rekreasi yang seringkali bersifat elitis, tetapi sekarang justru yang dipentingkan adalah untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Perubahan paradigma UNESCO dari yang lama menjadi yang mutakhir dapat dilihat melalui Tabel 1.

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Pengelolaan Pusaka Dunia UNESCO

Paradigma Lama	Paradigma Baru
Monumen raja, pendeta, politik	Tempat dan ruang manusia biasa
Kosong, situs material	Masyarakat berkelanjutan
Komponen fisik	Tradisi dan praktik kehidupan
Manajemen administrasi oleh pusat	Pembangunan masyarakat, desentralisasi
Penggunaan elit (untuk rekreasi)	Penggunaan populer (untuk pembangunan)

Sumber: Engelhardt (2006: 39)

**METODE PENELITIAN**

**Sampel dan Lokasi Penelitian.** Data primer dikumpulkan dengan cara survei sedangkan ukuran sampel ditentukan dengan formula Watson *et al.* (1993: 360) sebagai berikut

$$n = \frac{4.Z_{0,5\alpha}^2 p(1 - p)}{(\omega^2)} \tag{1}$$

dimana *n* merupakan ukuran sampel, *p* adalah proporsi kesuksesan yang diharapkan dari sampel, *q* adalah proporsi sisa (1 - *p*), *Z*<sub>0,5α</sub> adalah koefisien konfidensi, *ω* = *L* + *R* adalah jumlah kesalahan yang dapat ditoleransi dari rerata populasi pada batas kiri (*L*) dan batas kanan (*R*). Berdasarkan pendapat Palumbo (1977: 279), Zikmund (1991) dan Watson *et al.* (1993) diasumsikan *p* = 90 persen, α = 5 persen, maka dengan menggunakan rumus (1) sampel (*n*) ditetapkan sebanyak 200 orang.

Dengan demikian, *ω* adalah sebesar: 200 = 4.(2,58).2.(0,9).(0,1)/*ω*<sup>2</sup>; sehingga *ω* = √1,86/200 = 0,096 atau batas kesalahan yang ditoleransi 0,0482 (4,8 persen); distribusi sampel dilakukan secara multiplikatif (Van Zenten, 1994: 81). Kemudian, (i) sampel diambil secara *cluster* terhadap wisatawan reguler; baik wisnus (wisatawan nusantara) dan wisman (wisatawan mancanegara); (ii) survei dilakukan dengan wawancara di Borobudur dan Yogyakarta. Yogyakarta dijadikan tempat pengambilan sampel yang utama karena diasumsikan sebagai pintu masuk dan tempat menginap mayoritas wisatawan yang akan pergi ke Borobudur.

**Nilai Manfaat Ekonomi.** Fungsi utilitas dari individu *i* adalah *U*(*Q*, *Y*). *Q* adalah kualitas lingkungan, dan *Y* adalah penghasilan. Diasumsikan individu memandang serangkaian alternatif *A*(*Q*, *T*); *Q* = *Q*<sub>1</sub>, ..., *Q*<sub>*n*</sub> merupakan vektor dari kualitas lingkungan, dan *T* = *T*<sub>1</sub>, ..., *T*<sub>*n*</sub> merupakan vektor pembayaran (untuk menghindari degradasi lingkungan). Bilamana individu *i* memilih alternatif *j*, maka pembayarannya adalah *T*<sub>*ij*</sub>. Jika fungsi utilitas mengikuti rumus:

$$U_{ij} = V_{ij} + \epsilon_{ij} \tag{2}$$

$$\Rightarrow U_{ij} = V_i(Q_j, Y - T_{ij}) + \epsilon_{ij} \tag{3}$$

$U_{ij}$  merupakan utilitas total, dengan individu  $i$  menerima alternatif  $j$ .  $V_{ij}$  adalah komponen terobservasi, dan  $\epsilon_{ij}$  merupakan unsur tidak terobservasi. Vektor harga diabaikan, bilamana harga-harga diasumsikan konstan. Kemudian probabilitas,  $P_{ij}$ , dengan alternatif  $j$  dipilih oleh individu  $i$  adalah:

$$P_{ij} = \Pr(U_{ij} > U_{ik}, \forall k \in C) \quad (4)$$

$$\Rightarrow P_{ij} = \Pr(V_{ij} - V_{ik} > \epsilon_{ij} - \epsilon_{ik}, \forall k \in C) \quad (5)$$

$$\Rightarrow P_{ij} = \int_{-\infty}^{V_{ij}-V_{i1}} \int_{-\infty}^{V_{ij}-V_{i2}} \dots \int_{-\infty}^{V_{ij}-V_{in}} f[\bar{\epsilon}_1, \bar{\epsilon}_2, \dots, \bar{\epsilon}_m] d\bar{\epsilon}_m, \bar{\epsilon}_{m-1}, \dots, \bar{\epsilon}_1 \quad (6)$$

$\bar{\epsilon}_k = \epsilon_{ik} - \epsilon_{ij}$  adalah selisih *error*;  $\Omega$  adalah matriks kovarian dan  $f(\cdot)$  adalah selisih joint density of error. Selanjutnya McFadden (1974) mengatakan bahwa jika galat (*error*) pada persamaan (6) bersifat independen maka probabilitas pilihan,  $P_{ij}$ , ( $\lambda$  parameter rasio) merupakan representasi dari:

$$P_{ij} = \frac{e^{\lambda V_{ij}}}{\sum_k e^{\lambda V_{ik}}} \quad (7)$$

Dengan demikian, peningkatan kesediaan menghindari degradasi fungsi lingkungan yang tercermin pada satuan unit pembayaran serta peningkatan satu unit luas lahan (atau peningkatan kemauan mempertahankan kualitas lingkungan yang berarti semakin tinggi pula perhatian terhadap ekosistem beserta atribut-atribut biogeofisik dan kebudayaan hasil aktivitas manusia di dalamnya yang saling berkaitan diikutsertakan) maka diharapkan semakin besar pula peluang zona atau gabungan zona tersebut dipilih untuk dikonservasi.

Dalam survei diajukan pertanyaan kepada responden untuk memilih salah satu alternatif manajemen konservasi yang ditawarkan yaitu: (i) situs arkeologi saja (Candi Borobudur), (ii) situs arkeologi plus taman wisata di sekitarnya, (iii) situs arkeologi, taman wisata dan daerah penyangga, atau (iv) keseluruhan ekosistem. Pilihan responden terhadap bentuk manajemen konservasi yang pertama diberikan nilai 0, pilihan kepada bentuk kedua diberikan nilai 1, pilihan kepada bentuk ketiga diberikan nilai 2, dan pilihan kepada bentuk keempat diberikan nilai 3.

Teknik ini memperlihatkan bahwa manajemen konservasi yang berlaku saat ini ("*status quo*") dianggap yang paling konservatif sehingga diberikan nilai 0 (nol), sedangkan yang paling progresif (konservasi ekosistem) diberikan nilai tertinggi 3. Gradasi penilaian yang diberikan juga menunjukkan pemahaman konsumen terhadap risiko penurunan kualitas nilai yang dimiliki Kawasan Borobudur. Selanjutnya untuk meningkatkan akurasi responden dalam menentukan pilihannya, maka sebelum menjawab kuesioner responden diberikan pemahaman mendalam terhadap Borobudur terkini yang disampaikan melalui sebuah sinopsis. Setelah itu responden diberikan penawaran untuk membantu biaya konservasi ( $T$ ) dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan yang tertinggi 10 juta rupiah per orang per tahun (Tabel 2). Dengan teknik Kuriyama (1998: 6), fungsi utilitas tidak langsung yang diestimasi diasumsikan menggunakan model persamaan umum:

$$V_{ij} = \beta_1 T_{ij} + \beta_2 \log Q_j \quad (8)$$

$\beta$  merupakan serangkaian parameter yang diestimasi. Estimasi kesejahteraan dari konservasi ekosistem merupakan diferensial dari fungsi (8) yaitu:



Tabel 2. Alternatif Konservasi Saujana Budaya Kawasan Borobudur

No	Deskripsi	Pembayaran (T) rupiah
1	Konservasi hanya pada situs arkeologi (A)	.....
2	Konservasi situs arkeologi plus taman wisata di sekitarnya (B)	.....
3	Konservasi situs arekologi, taman wisata & daerah penyangga (C)	.....
4	Konservasi seluruh ekosistem (D)	.....

Sumber: Berbagai sumber.

Tabel 3. Hasil Empiris WTP

Wilayah	Luas Q (ha)	WTP	Σ konsu- men	Agregat WTP/org/th	Biaya mana- jemen kon- servasi	Manfaat bersih/th
	1	2	3	4 = (2) x (3)	5	6 = (4) - (5)
(ha)	US\$	orang	US\$	US\$	US\$	Rp
A						
A+B						
A+B+C						
A+B+C+D						

$$dV_{ij} = \frac{\delta V_{ij}}{dT_{ij}} dT_{ij} + \frac{\delta V_{ij}}{dQ_{ij}} dQ_{ij} \tag{9}$$

$$\Rightarrow dV_{ij} = \frac{\beta_2}{\beta_1} (\log Q_1 - \log Q_j) \tag{10}$$

Dengan utilitas diasumsikan konstan ( $dV_{ij} = 0$ ), maka ukuran moneter untuk 1 unit perubahan daerah yang dikonservasi adalah:

$$\frac{dT_{ij}}{dQ_j} = -\frac{\beta_2}{\beta_1} \frac{1}{Q} \tag{11}$$

Kemudian, *consumer surplus* (CS) atau *willingness to pay* (WTP) terhadap perubahan dari  $Q_1$  menjadi  $Q_j$  adalah:

$$WTP = \int_{Q_1}^{Q_j} \left[ -\frac{\beta_2}{\beta_1} \frac{1}{Q} \right] dQ \tag{12}$$

$$\Rightarrow WTP = \frac{\beta_2}{\beta_1} (\log Q_1 - \log Q_j) \tag{13}$$

Pada Tabel 3 estimasi agregat WTP (kolom 4) adalah perkalian *expected* WTP dengan populasi. Manfaat bersih konservasi dihitung dengan mengurangkan agregat WTP dengan biayanya (kolom 6). Biaya tersebut dihitung dengan memakai nilai sewa lahan. Nilai sekarang manfaat konservasi dihitung menggunakan nilai diskonto barang lingkungan 1,3 persen per tahun (Stern, 2006).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Profil Responden.** Seperti direncanakan semula, penelitian ini mengeksplorasi 200 responden wisatawan. Mayoritas responden adalah pria meskipun proporsinya tidak jauh berbeda dengan wanita. Pendidikan mereka kebanyakan adalah sarjana. Meskipun begitu, 58,5 persen dari total responden tidak terikat dalam status perkawinan. Selaras dengan itu maka 33,5 persen responden tidak memiliki tanggungan anak.

Di dalam penelitian ini 35 persen responden adalah wisatawan mancanegara atau berke-warganegaraan asing yang sedang melancong ke Indonesia, khususnya Yogyakarta dan Candi Borobudur. Responden banyak yang bekerja sebagai administratur pemerintah, pemasar, bidang pariwisata, transportasi dan komunikasi, pendidikan dan lain-lain.

Responden kebanyakan bekerja di sektor jasa, termasuk juga ada yang berasal dari bidang pariwisata seperti perhotelan dan biro perjalanan. Rerata usia responden 43,73 tahun atau dalam kisaran 25 sampai 75 tahun). Searle dan Jackson (1985), serta Boo (Luzar *et al.*, 1998: 51), menyatakan bahwa karakteristik sosial-ekonomi yaitu pendapatan, pekerjaan dan pendidikan serta demografi yaitu umur, gender, status perkawinan, pekerjaan, status perkawinan dan daerah asal, memengaruhi kesediaan konsumen untuk melestarikan lingkungan. Semakin tinggi sosial-ekonominya, wisatawan akan membutuhkan produk pariwisata yang semakin eksotik. Mereka biasanya juga memiliki literasi yang cukup terhadap pembangunan lingkungan hidup. Dengan demikian, adanya degradasi lingkungan seringkali menjadi isu yang sensitif bagi kunjungan mereka. Perbedaan jenis kelamin dan umur wisatawan secara umum berimplikasi terhadap ketidaksamaan akses waktu bersenang-senang (*leisure time*), sedangkan daerah asal wisatawan memiliki perbedaan sikap serta perilaku terhadap kebutuhan produk pariwisata sehingga kadang perlu proses sosialisasi tersendiri (Henderson *et al.*, 1988). Pria biasanya memilih wisata yang menguras adrenalin seperti arung jeram, sedangkan ukuran keluarga (*family size*) seringkali merupakan hambatan komitmen untuk melakukan aktivitas rekreasi (Searle dan Jackson, 1985). Pada penelitian ini tampaknya hambatan terhadap aktivitas tersebut relatif tidak terlihat melihat rerata frekuensi kunjungan ke Borobudur dua kali.

**Penilaian Terhadap Pilihan Konservasi.** Dengan menggunakan teknik Soeroso (2009) yang menampilkan berbagai peta tematik, dan kemudian diadopsi Kementerian Pekerjaan Umum (2010) untuk dioperasionalisasikan menjadi Kawasan Strategis Nasional, wilayah Borobudur yang dipilih penulis untuk dikonservasi dipilah menjadi empat zona. Zona I berupa zona pelestarian yang fokusnya hanya kepada candi, monumen atau situs arkeologi saja seperti selama ini dilakukan. Pilihan ini memperlihatkan pada kehendak mempertahankan kebijakan yang sekarang berlaku ("*status quo*"). Zona II yaitu sebuah *hinterland* atau zona penyangga (*buffer zone*) yang digunakan untuk menjaga panorama alam, situs bekas danau purba, persawahan dan jalur hijau tetap seperti sediakala.

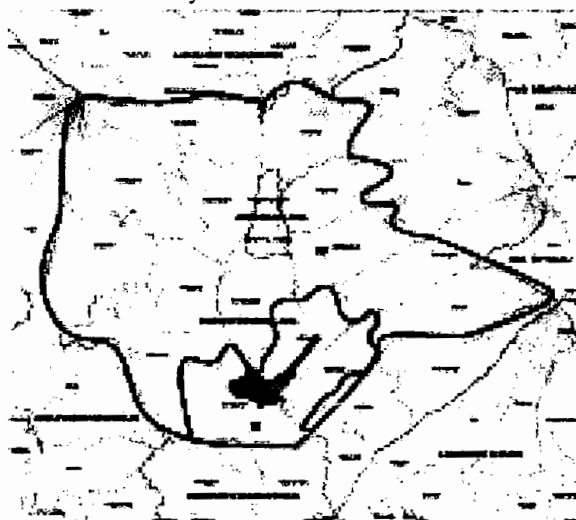
Selanjutnya Zona III dirancang untuk pengembangan perekonomian serta perniagaan, perkantoran dan perumahan secara terkendali. Semuanya diatur dengan norma yang spesifik, misalkan dengan ditentukan besaran koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien luas bangunan (KLB). Terakhir Zona IV, berupa kawasan ekologis yang diperuntukkan untuk mendukung Zona I-III. Daerah ini merupakan kawasan hidrologi, sehingga diperlukan bukan hanya daerah Borobudur atau Kabupaten Magelang saja tetapi juga warga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada daerah ini banyak sungai yang mengalir lintas kabupaten dan provinsi sebelum akhirnya bermuara di Samudera Hindia. Zonasi tersebut masing-masing berukuran 210,9; 2.177,4; 25.094,9; dan terakhir sebesar 46.440,4 hektar. Pembagian zona pelestarian Kawasan Borobudur selanjutnya dapat dilihat melalui Gambar 2.

Pada saat  $Y = 1$  (Tabel 3),  $T$  dan  $Q$  menunjukkan jika konservasi diimplementasikan hanya mencakup Zona I+II maka peluang untuk menghindari degradasi lingkungan adalah sebesar  $e^{0,53}$  atau 1,69 kali lebih besar dibandingkan hanya melakukan konservasi di Zona I, yaitu Candi Borobudur saja dengan  $p < 0,10$ . Sementara itu, pada  $Y = 2$ ,  $T$  dan  $Q$  memperlihatkan jika konservasi dilakukan pada Zona I+II+III maka peluang untuk menghindari penurunan fungsi lingkungan adalah sebesar  $e^{1,72} = 5,58$  kali lebih besar dibandingkan jika

hanya melakukan konservasi pada Zona I+II.

Kemudian pada  $Y = 2$ , perlambatan degradasi lingkungan dapat dicapai sebesar  $e^1,1$  atau 3 kali lebih besar dibandingkan hanya melakukan konservasi di Zona I, yaitu Candi Borobudur saja ( $p < 0,05$ ). Sementara itu, pada  $Y = 2$ ,  $T$  dan  $Q$  memperlihatkan jika konservasi dilakukan pada Zona I+II+III maka peluang menghindari penurunan fungsi lingkungan adalah sebesar  $e^{3,9} = 49,4$  kali lebih besar dibandingkan jika hanya melakukan konservasi pada Zona I dan II ( $p < 0,01$ ). Terakhir, jika  $Y = 3$ , peluang kerusakan lingkungan dapat dihindari 26,06 kali ( $e^{3,26} = p < 0,01$ ), sedangkan penurunan fungsinya berpeluang untuk dihindari 249,6 kali lebih tinggi ( $p < 0,001$ ).

Gambar 2. Wilayah Konservasi Kawasan Borobudur



Tabel 4. Hasil Empiris WTP

Variable	Coefficient	Standard Error	b/St.Er.	P[-Z-->z]	Mean of X
<i>Characteristics in numerator of Prob[Y = 1]</i>					
Constant	-5,186585044	1,6761921	-3,094	,0020	
LOG Q	,5312145288	,28974783	1,833	,0667	2,5301500
LOG T	1,715443383	,46467817	3,692	,0002	3,5934000
<i>Characteristics in numerator of Prob[Y = 2]</i>					
Constant	-14,55145242	2,5265469	-5,759	,0000	
LOG Q	1,103584926	,42110674	2,621	,0088	2,5301500
LOG T	3,918830935	,66256146	5,915	,0000	3,5934000
<i>Characteristics in numerator of Prob[Y = 3]</i>					
Constant	-26,20269717	3,5896136	-7,300	,0000	
LOG Q	3,269605228	,53218134	6,144	,0000	2,5301500
LOG T	5,524709918	,73550867	,511	,0000	3,5934000

Untuk menghitung nilai manfaat ekonomi kawasan Borobudur digunakan rerata kesediaan individu untuk membayar konservasi ( $T$ ) dan luas Zona ( $Q$ ). Hasil empiris per orang per

tahun, menggunakan rerata pembayaran sebesar US\$399,13 (asumsi: US\$1 = Rp9.500).

$$\text{WTP Zona I} = 0 \quad (14)$$

$$\text{WTP Zona I+II} = -5,19 + 1,72(399,13) = \text{US\$ } 681.3136 (\text{Rp } 6.472.479,2) \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \text{WTP Zona I+II+III} &= -14,55 + 1,10(399,13) + 3,19(24.180,48) \\ &= \text{US\$ } 501,6272 (\text{Rp } 4.765.458,4) \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \text{WTP Zona I+II+III+IV} &= -26,20 + 3,27(399,13) + 5,524(46,42) \\ &= \text{US\$ } 1.535,1935 (\text{Rp } 14.586.100,5) \end{aligned} \quad (17)$$

Candi Borobudur menjadi pusaka dunia karena memiliki tiga *outstanding universal value* yaitu (i) mewakili sebuah mahakarya kejeniusan kreativitas manusia; (ii) memperlihatkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu, atau dalam suatu kawasan budaya di dunia, terhadap pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota, atau rancangan bentanglahan (*landscape*); dan juga (iii) secara langsung atau nyata terkait dengan peristiwa-peristiwa atau tradisi yang masih hidup, dengan gagasan atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai-nilai universal signifikan. Namun demikian, meskipun diberikan apresiasi tinggi, konservasi secara parsial terhadap situs arkeologis Candi Borobudur saja dipandang hanya memiliki pandangan yang berdurasi jangka pendek dan berorientasi kepada fisik barang, ekonomi dan rekreasi.

Manajemen konservasi seperti ini tidak berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu keseimbangan ekosistem dan pembangunan holistik, termasuk masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya. Jika hal ini diteruskan, tentu konservasi semacam itu akan memiliki posisi yang tidak sejalan dengan paradigma pengelolaan pusaka dunia (*world heritage*) seperti digariskan PBB melalui UNESCO. Untuk itu pilihan terhadap manajemen konservasi yang hanya berorientasi monumen seperti selama ini dilakukan ("*status quo*") dianggap yang paling konservatif, sehingga memiliki nilai WTP = 0 (nol), sedangkan yang paling progresif (konservasi ekosistem) memiliki nilai tertinggi. Di sini terlihat bahwa gradasi peruliaan menunjukkan besaran tingkat kesediaan konsumen untuk menghindari risiko penurunan kualitas nilai ekstrinsik dan intrinsik yang dimiliki Candi Borobudur dan kawasan di sekitarnya.

Jadi jelas bahwa WTP Candi Borobudur yang setara dengan nol bukanlah proksi untuk nilai amenities Candi Borobudur yang diapresiasi tinggi oleh masyarakat dunia. Dari hasil penilaian itu tergambar pula bahwa peranan ekosistem dipandang sangatlah besar terhadap kelangsungan keberadaan candi tersebut. Haruslah dilihat bahwa ekosistem selalu berafiliasi pada tiga komponen lingkungan ABC (*Abiotic, Biotic and Cultural*) yang tidak terpisahkan. *Abiotic* dipersonifikasikan oleh unsur fisik seperti geologi, geomorfologi, tanah, tata guna lahan, tata ruang, dan lain-lain, sedangkan *Biotic* diungkapkan oleh kelestarian kehidupan flora dan fauna. Sementara itu, unsur *Cultural* terbentang luas menyangkut peri kehidupan manusia termasuk juga pengelolaannya.

Karena itu jika ekosistem rusak dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengupayakan kehidupan kesehariannya secara normal pada akhirnya akan berujung pada penurunan kesejahteraan. Karena itu upaya menjadi pedagang asongan atau kegiatan lain di sekitar lahan Candi Borobudur merupakan jalan pintas pemenuhan kebutuhan hidup dan ini ternyata mengganggu upaya pelestarian pusaka milik masyarakat dunia tersebut.

Tabel 5. Biaya Konservasi Per tahun

Zona	Luas Q (ha)	Luas karakteristik (ha)		Biaya manajemen konservasi (US\$)		6 = (4) + (5) Total
	1	Perkotaan (55,66%)	Perdesaan (44,34%)	Perkotaan	Perdesaan	
I	436,25	242,82	193,43	242.818,42	4.893,89	247.712,31
I+II	2.914,99	1.622,48	1.292,51	1.622.484,55	32.700,44	1.655.184,99
I+II+III	24.180,48	13.458,85	10.721,62	13.458.853,50	271.257,07	13.730.110,57
I+II+III+IV	46.418,38	25.836,47	20.581,91	25.836.470,86	520.722,33	26.357.193,19

Sumber: Hasil perhitungan

Ket.: biaya konservasi/hektar/tahun untuk perkotaan US\$1,000(Rp10 juta)& pedesaan US\$25.30(Rp 253ribu)

Dari analisis didapat bahwa perhitungan biaya konservasi pada Tabel 4, kolom 4 dan 5 adalah perkalian kolom 2 dan 3 dengan unit biaya konservasi. Rerata biaya erosi di pedesaan termasuk pegunungan diasumsikan sebesar Rp253.000,00 (US\$25,30) per hektar per tahun (Moller dan Ranke, 2004); sedangkan untuk lahan perkotaan menggunakan asumsi sewa lahan di daerah tersebut pada umumnya yaitu Rp10 juta (US\$ 1.000) per hektar per tahun. Adapun kolom 6 merupakan penjumlahan kolom 4 dan 5 yaitu total biaya manajemen konservasi. Perhitungan pada Tabel 5 menunjukkan jika konservasi yang terintegrasi terhadap seluruh Kawasan Borobudur akan memberikan nilai manfaat ekonomi sebesar US\$ 4,2 miliar per tahun atau sekitar Rp40,1 triliun.

Hasil ini bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Republik Indonesia 2009 dalam hal transfer ke daerah yang mencapai Rp320,7 triliun dengan total defisit keseluruhan yang mencapai nilai Rp51,3 triliun (Bappeki Kemenkeu RI, 2009) maka manfaat ekonomi dari konservasi Kawasan Borobudur tampak signifikan.

Tabel 6. Estimasi WTP Manajemen Konservasi Kawasan Borobudur

Zona	Luas Q (ha)	WTP/ orang/ tahun	Σ Kons.	Agregat WTP	Biaya Manajemen Konservasi	Manfaat Bersih /tahun	Nilai dalam Rp
	1 (ha)	2 US\$	3 orang	4=(2) x (3) US\$	5 US\$	6=(4)-(5) US\$	
I	436,25	-	2768924,00	-	247712,31	-247 712,31	-2353 266 945,00
I+II	2914,99	681,31	2768924,00	1886495610,00	1655184,99	1884840 425,45	17905 984041 775,00
I+II+III	24180,48	501,63	2768924,00	1388975346,00	13730 110,57	1375245 235,55	13064 829737 725,00
I+II+III+ IV	46418,38	1535,19	2768924,00	4250824436,00	26357 193,19	4224467 242,37	40132 438802 515,00

Pertambahan nilai manfaat konservasi tampak selaras dengan perluasan zona yang dikonservasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas zona konservasi yang dipilih maka diharapkan semakin tinggi pula nilai manfaat yang diperoleh. Namun demikian tampak bahwa nilai manfaat ekonomi Zona II di atas Zona III. Hal ini menunjukkan bahwa rancang bangun pembangunan zona inti seharusnya mengacu kepada *Borobudur temple compound* (komplek Candi Borobudur) sebagai *world heritage* dengan nomor C-592 seperti ditetapkan UNESCO, yang meliputi Candi Borobudur, Pawon dan Mendut sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan. Pembangunan bukan hanya diarahkan ke Candi Borobudur saja seperti se-

Tabel 7. Perbedaan Esensi Pengelolaan Kawasan Borobudur

No	Perbedaan	Lama	Baru
1	Orientasi	Monumen	Kawasan
2	Konsep	Monumen yang mati	Ruang dan kehidupannya
3	Proses	<i>Top-down</i>	<i>Top-down, bottom-up</i>
4	Keterlibatan komponen	Sebagian	Seluruhnya
5	Kebijakan, penanganan	Parsial, sektoral	Komprehensif
6	Tujuan pelestarian	Fisik, material benda	Lingkungan hidup
7	Eksplorator	Negara	Masyarakat dan negara

Sumber: Berbagai sumber

lama ini dilakukan sehingga seolah-olah melupakan keberadaan Candi Mendut dan Pawon beserta masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Dengan perkataan lain, bila konservasi hanya dilakukan pada Zona I saja, maka jika terjadi kesalahan pengelolaan masyarakat akan menanggung kerugian US\$247.712,31 per orang per tahun. Hal ini terjadi karena pembangunan di Zona II sampai IV diabaikan sehingga membuat ekosistem kawasan tidak *equilibrium* (seimbang). Jika hanya Zona I yang dikonservasi kemungkinan pembangunan di Zona II tidak dapat dikendalikan atau menurunkan fungsi dan kualitas lingkungan. Sebagai contoh akan muncul gedung hotel bertingkat tinggi yang dapat mengganggu siklus hidrologi dan juga menghalangi konsumen menikmati panorama alam (*scenic view*). Bahkan mengabaikan Zona III berakibat hilangnya bioregion tempat beranak-pinak fauna penting seperti Elang Jawa—yang merupakan satwa langka yang dilindungi dan juga lambang Negara RI—tempat plasma nuftah sebagai bahan baku obat-obatan dan belum lagi kesenian rakyat yang merupakan keanekaragaman kultural. Jika konservasi hanya dilakukan pada Zona I dan II atau I, II dan III saja dan terjadi kesalahan pengelolaan maka masyarakat akan menanggung kerugian paling tidak sebesar masing-masing US\$1,9 dan 1,4 triliun per orang per tahun.

Dengan begitu, prinsip pengelolaan pusaka budaya dunia seperti selama ini dilakukan dengan: (i) masih berorientasi pada monumen dan situs; (ii) proses pengambilan keputusan yang bersifat komando dari atas ke bawah (*top-down*); (iii) hanya melibatkan sebagian komponen (tanpa melibatkan masyarakat lokal); (iv) bersifat sektoral atau parsial; dan (v) dengan inisiator dan eksplorator hanya pada negara, perlu diubah (Tabel 7).

Paradigma tersebut sepatutnya diubah menjadi: (i) berorientasi kawasan; (ii) konsep ruang yang hidup; (iii) prosesnya dilakukan *top-down* dan *bottom-up*; (iv) melibatkan seluruh pihak terkait (*stakeholders*); (v) penanganannya komprehensif; (vi) penekanan pada pelestarian lingkungan hidup; dan (vii) eksplorasi dilakukan oleh semua pihak baik masyarakat maupun negara. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan, kesejahteraan dan keberadaan makhluk hidup diperlukan suatu pengelolaan kawasan beserta tata ruang yang dikelola secara holistik; menyangkut kesatuan ruang, benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraannya serta makhluk hidup lain (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Selain itu perubahan paradigma pengelolaan akan menjamin hubungan antara manusia dan lingkungan hidup selaras, serasi dan seimbang serta terjaminnya kelestarian fungsi dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.

## PENUTUP

Kawasan Borobudur merupakan bentuk kawasan tertentu seperti diundangkan melalui

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga memiliki nilai strategis secara nasional. Dengan menggunakan sampel 200 orang wisatawan diketahui bahwa nilai manfaat ekonomi konservasi Kawasan Borobudur mencapai US\$ 4,2 miliar per tahun atau sekitar Rp 40,1 triliun. Nilai tersebut dapat bermanfaat secara operasional jika perencanaan dan pengelolaannya dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu konservasi holistik terhadap keseluruhan ekosistem Kawasan Borobudur yang memberikan apresiasi terhadap peran dan *living culture* masyarakat akan jauh lebih baik dibandingkan dengan pelestarian parsial yang hanya memperhatikan monumen Candi Borobudur saja. Implikasinya Pemerintah perlu mengganti Keppres Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan pengelolaan Kawasan Borobudur kepada tiga pengelola. Setelah itu perlu dibentuk suatu badan pengelola baru yang terintegrasi, komprehensif, dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*) baik Pemerintah Pusat dan Daerah maupun masyarakat lokal. Organisasi seperti ini perlu dijalankan dengan prinsip *share responsibility* dan mandiri dalam finansial. Visi pengelolaan Kawasan Borobudur yang memiliki ikon Pusaka Dunia ke depan pun perlu mengalami metamorfosis dari yang semula fokusnya pada laba jangka pendek melalui peningkatan pasar pariwisata berubah menjadi pencapaian kesejahteraan jangka panjang berlandaskan pelestarian dan pendidikan.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, BUMN dan juga Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang selama ini mengelola Kawasan Borobudur secara terpisah dapat bergabung dengan membentuk satu organisasi pengelola yang baru seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 97 Ayat 3. Pada Ayat 4 dinyatakan pula bahwa Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk memperkuat barisan pengelola, kementerian lain seperti Pendidikan Nasional dan PU perlu dilibatkan.

Tentu saja pengelolaan kawasan seperti ini nantinya bukan dimaksudkan untuk menjadi sebuah badan otorita yang akan mengurangi kewenangan pemerintah daerah seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun sebagai bentuk sinergi para pihak yang kompeten agar menyederhanakan koordinasi dan birokrasi, serta dapat mengurangi beban pendanaan Pemerintah. Selain itu hal yang paling penting bahwa organisasi ini tujuan utamanya adalah pelestarian, sedangkan hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat dengan menyingkat proses redistribusi. Harapannya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Adapun prinsip dasar yang perlu dijadikan landasan dalam menyusun pengelolaan Kawasan Borobudur tersebut adalah sebagai berikut. Nilai terpenting Candi Borobudur adalah fungsinya sebagai tempat belajar manusia untuk mencapai pencerahan. Tempat ini merupakan pusat pembelajaran masyarakat agar menjadi lebih baik. Dengan demikian pengembangan pariwisatanya harus dibangun berlandaskan pada edukasi sehingga diarahkan pada ekowisata dan bukan lagi pada pariwisata masal. Candi Borobudur merupakan Mandala yaitu alat penguat dan jalan masuk manusia mencapai kearifan dalam mempersatukan makrokosmos (alam pemberi limpahan materi) dan mikrokosmos (manusia yang menggunakannya) untuk mendapat keseimbangan, ekuilibrium dan simetri antara habitat atau lingkungan dengan dirinya sehingga dapat menjadi pusat kekuatan yang memancarkan aura energi ke daerah sekelilingnya.

Namun sebaliknya, monumen itu akan menjadi pusat aktivitas jika mendapatkan energi dari *living space* dan *living culture* masyarakat di sekitarnya. Untuk itu perlu upaya revitalisasi dan penguatan wilayah di sekelilingnya, dengan merancang sebagai daerah

pelindung (*buffer zone*) kelestariannya. Untuk mendukung kegiatan tersebut maka di dalam rancangan pengelolaan kawasan Borobudur perlu digunakan pertimbangan *multi-facet* yang meliputi *landscape*, arsitektur, tata ruang, geografi, geologi, arkeologi, antropologi dan bukan hanya fisik dan ekonomi seperti selama ini dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Australian National University. (2000). "Challenges for Heritage Conservation and Sustainable Development in the 21st Century". *Makalah "Heritage Economics" di Australian National University, Canberra*, 7(4).
- Atmadi, P. (1979). *Beberapa Patokan Perancangan Bangunan Candi: Suatu Penelitian Melalui Ungkapan Bangunan pada Relief Candi Borobudur*. Jakarta: Proyek Pelita Pemugaran Candi Borobudur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Australia, ICOMOS. (1995). "Asia-Pacific Regional Workshop on Associative Cultural Landscapes: A Report by Australia ICOMOS to the World Heritage Committee". *Makalah*. New South Wales.
- Ayala, H. (1996). Resort Ecotourism: A Paradigm for the 21st Century. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 37 (5), 46-53.
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bappeki), Kementerian Keuangan RI. (2009). *Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009*. Diakses online melalui <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki>.
- Brown, L. R. (2001). *Eco-Economy: Building an Economy for the Earth*. New York: W.W. Norton & Company.
- Budiadi, E. (1992). *Studi Geologi dan Bahan Galian Golongan C Daerah Bendungan Borobudur Perbukitan Kulon Progo Berdasarkan Interpretasi Citra Spot dan Foto Udara*. Tesis. Yogyakarta.
- Caporossi, G. (2004). *Comparison of Hypothetical Willingness-to-pay vs. Actual Payment for Open Space via Public Referenda*. Tesis. New Hampshire USA.
- Coleman, V. (2002). *Cultural Landscapes Charette Background Paper*. *Makalah*. New South Wales.
- Costanza, R. (1997). The Value of The World's Ecosystem Services An Natural Capital. *Nature*, 387-395.
- Dunlap, R. E. & Liere, K. D. V. (1978). The New Ecological Paradigm: A Proposed Measuring Instrument and Preliminary Results. *Journal of Environmental Education*, 9, 10-19.
- Engelhardt, R. A. (2005). "World Heritage: Its Implication and Relevance for Humanity". *Makalah*. Hiroshima.
- EUR (Erasmus University Rotterdam), (2003). *A Handbook of Cultural Economics*. Rotterdam, Netherlands: Digital Academic Repository, Erasmus University Rotterdam.
- Fauzi, A. (2005). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Getty Conservation Institute (GCI). (1998). *Economics and Heritage Conservation: A Meeting Organized by the Getty Conservation Institute*. Los Angeles: Getty Center.



- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M. & Donnelly, J. H. Jr. (1997). *Organizations: Behavior, Structure, Processes 9th ed.*. Chicago: Richard D. Irwin.
- Gossen, C. (1993). "Ecoculture and Survival: Sustainability vs. Habit & Behavior Sustainable Structures". *Mimeo*.
- Grijalva, T., Berrens, R. P., Bohara, A. K. & Shaw, W. D. (2001). Testing the Validity of Contingent Behavior Trip Responses. *American Journal of Agricultural Economics*.
- Himayatullah. (2003). "An Empirical Investigation of the Willingness to Pay for Recreational Services: An Application of Multivariate Analyses for Two Public Parks in NWFP". *Makalah*. Peshawar.
- Presiden Republik Indonesia. (1992). *Keppres Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya*.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- . (2007). *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- . (2009). *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.
- . (2009). *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- . (2010). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Henderson, J. V. (1988). *Urban Development: Theory, Fact, and Illusion*. New York: Oxford University Press.
- Jebessa, S. (2004). *Contingent Valuation of Multi-Purpose Tree Resources: The Case of Arsi Zone, Ethiopia*. Tesis. Addis Ababa.
- JPPPI (Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I. (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia*. Ciloto: Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.
- Kuriyama, F. (1998). "Measuring the Value of Ecosystem in the Kushiro Wetland: An Empirical Study of Choice Experiments". *Makalah*. Sapporo.
- Kementerian Pekerjaan Umum (2010). *Kawasan Strategis Nasional*. Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Jenderal Penataan Ruang.
- Luzar, E. J., Diagne, A., Gan, C. E. & Henning, B. R. (1998). Profiling the Nature-Based Tourist: A Multinomial Logit Approach. *Journal of Travel Research*, 37 (8), 48-55.
- Mercer, E., Kramer, R. & Sharma, N. (1995). Estimating The Benefits of Tourism Development in A New National Park in Madagascar. *Journal of Forest Economics*, 1 (2), 239-270.
- Merric, H.J. & Hunt, J. (1998). Ecotourist Motivational and Demographic Characteristics: A case of North Carolina Travelers. *Journal of Travel Research*, 36 (Spring), 57-61.
- Möller, A. & Ranke, U. (2004). *Estimation of Economic Costs of Soil Erosion in Kabupaten Sleman, Indonesia*. Hannover: Federal Institute of Geosciences and Natural Resources.

- Moons, E. (2003). *The Development and Application of Economic Valuation Techniques and Their Use in Environmental Policy: A Survey*. Belgium: Center for Economic Studies, Katholieke Universiteit Leuven.
- Murwanto, H., Gunnell, Y., Suharsono, S., Sutikno, S. & Lavigne, F. (2004). Borobudur Monument (Java, Indonesia) Stood by A Natural Lake: Chronostratigraphic Evidence and Historical Implications. *The Holocene*, 14 (3), 459-463.
- Navrud, S. & Ready, R. C. (2002). *Valuing Cultural Heritage: Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Ohara, K. (1998). The Image of "Ecomuseum" in Japan. *Pacific Friends*, 25(12), 26-27.
- Palumbo, D. J. (1977). *Statistics in Political and Behavioral Science Rev.* Ed. New York: Colombia University Press.
- PJWB (Paguyuban Jasa Wisata Borobudur). (2005). *Daftar Anggota Paguyuban Jasa Wisata Borobudur*. Borobudur: PJWB.
- Rashev, B. (2003). *Alternative Economic Valuation of Pirin National Park Bulgaria: Application of Contingent Valuation Method and Travel Cost Method*. Tesis. Cottbus.
- Rodriguez, D.J. (2000). *Cost-Benefit Analysis of Environmental Quality Improvement Projects: Uncertain Benefits of Willingness to Pay from Referendum Contingent Valuation*. Tesis. Blacksburg.
- Searle, M.S. & Jackson, E.L. (1985). Socioeconomic Variations in Perceived Barriers to Recreation Participation Among Would-be Participants. *Leisure Sciences*, 7, 227-249.
- Setyawibawa, U. (1998). *Perkembangan Permukiman di Zona Pengembangan Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang Tahun 1977-1996*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Sirakaya, E. & McLellan, R.W. (1998). Modelling Tour Operators-Voluntary Compliance With Ecotourism Principles: A Behavioral Approach. *Journal of Travel Research*, 36 (Winter), 42-55.
- Soeroso, A. (2009). *Valuing Borobudur's Cultural Landscape Heritage: Using Multi-attributes Environmental Economics Frameworks to Enactive Ecotourism Policy*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Stern, N. (2006). *The Economic of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Surachman, A. (1990). *Persepsi Masyarakat Setempat terhadap Integrasi Masyarakat Pendatang di Lingkungan Taman Pubakala Nasional Borobudur*. Tesis. Yogyakarta.
- Taylor, K. (2003). Cultural Landscape As Open Air Museum: Borobudur World Heritage Site and Its Setting. *Humanities Research*, 10 (2), 51-62.
- Tempesta, T. & Thiene, M. (2003). "The Willingness to Pay for the Conservation of Mountain Landscape in Cortina d-Ampezzo". *Makalah*. Itali.
- Throsby, D. (1999). Cultural Capital. *Journal of Cultural Economics*, 23, 3-12.

- TWCBPRB, PT. (2006). *Laporan Keuangan Perusahaan Tahunan Tahun 2005*. Yogyakarta: PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (PT. TWCBPRB).
- UNESCO. (2003). *Reports on The State of Conservation of Properties Inscribed on The World Heritage List: Reactive Monitoring Mission, April 2003*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2006). *Reports on The State of Conservation of Properties Inscribed on The World Heritage List: Reactive Monitoring Mission, February 2006*. Vilnius: UNESCO.
- UNESCO. (2009). *Extract of the Decisions Adopted by The World Heritage Committee at Its 33rd Session: Borobudur Temple Compound, Indonesia (C-592) Decision: 33 COM 7B 74*. Seville: UNESCO.
- Van Zenten, W. (1994). *Statistika Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, edisi kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wall, G. (1995). Preserving Nature and Cultural Heritage. *Annals of Tourism Research*, 22, 237-238.
- Watson, C.J., Ballingsley, P., Croft, D.J. & Hundsberger, D.V. (1993). *Statistic for Management and Economics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Wight, P. (1993). Ecotourism: Ethics or Eco-Sell?. *Journal of Travel Research*, 31 (Winter), 3-9.
- Winarni. (2006). *Kajian Perubahan Ruang Kawasan World Cultural Heritage Candi Borobudur*. Tesis. Yogyakarta.
- World Heritage Committee (WHC). (2004). *The Decisions Adopted by 28th Session of the World Heritage Committee (28 COM 15B.59) at Suzhou China 28 June-7 July 2004*. Suzhou: WHC.
- Zikmund, W.G. (1991). *Exploring Marketing Research*. Chicago: Dryden Press.
- Zubadi, H. (1998). *Pedagang Asongan di Taman Wisata Candi Borobudur*. Tesis. Yogyakarta.